

MEWUJUDKAN KOMUNITAS KEAMANAN TERPADU (K2T) BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI PARTISIPASI STAKEHOLDERS (STUDI DI KELURAHAN SUKARAME)

M. Syafei¹, Intan Fitri Meutia², Devi Yulianti³

^{1;2;3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
m.syafei@gmail.com

Abstrak

Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) merupakan sebuah kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Untuk menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) dalam suatu lingkungan tentunya kita tidak bisa mengandalkan salah satu pihak saja melainkan harus melibatkan berbagai macam stakeholders. Collaborative Governance merupakan salah satu cara kecenderungan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga yang dapat dilakukan dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas). Hal ini lah yang dilakukan oleh Kelurahan Sukarame dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di lingkungan Kelurahan Sukarame melalui Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Keterlibatan stakeholders diantaranya pemerintah, Polisi, Danramil, RAPI, swasta dan masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Partisipasi, Stakeholders, Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

Abstract

Security and Order is a basic need that is always expected by the community in carrying out daily activities. To create a Security and Order situation in an environment, of course we cannot rely on just one party but must involve a variety of stakeholders. Collaborative Governance is one of the ways in which trends emerge from the development of science and institutional or institutional capacity that can be done in creating Security and Order. This was done by the Sukarame village in creating Security and Order within the Sukarame Kelurahan environment through the Integrated Security Community (K2T). The involvement of stakeholders including the government, police, military, RAPI, the private sector and the community through various forms of participation.

Key Words: Collaborative Governance, Participation, Stakeholders, Integrated Security Community

I. PENDAHULUAN

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan indikasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan maupun yang

dilakukan oleh kelompok dari pihak-pihak tertentu.

Adanya rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi suatu lingkungan masyarakat dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang seterusnya mengganggu pemenuhan taraf hidup dan menimbulkan suasana yang mencekam atau penuh

ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang berada di ujung Pulau Sumatera yang menjadi akses terakhir jalur perlintasan antar provinsi dari pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Terkait dengan keamanan dan ketertibannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan tindak kriminalitas yang begitu besar seperti Curat, Curas dan Curanmor (C3), Begal, penyelundupan senjata api rakitan, konflik-konflik sosial lainnya, dan aksi-aksi lainnya yang mengganggu Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Wilayah Provinsi Lampung. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap sejumlah 14 perkara selama tujuh hari Operasi Sikat Krakatau 2019, mulai tanggal 5 Juli hingga 12 Juli 2019, dengan tindak pidana kejahatan meliputi C3 (Curat, Curas dan Curanmor). Dari jumlah tersangka itu, kasus yang paling menonjol yakni penggunaan senpi ilegal untuk melakukan kejahatan. Perkara ini masuk dalam TO Operasi Sikat Krakatau 2019. Barang bukti yang diamankan dari 14 kasus yang berhasil diungkap sebanyak 26, meliputi satu pucuk senjata api, 12 unit amunisi, empat kendaraan roda dua, dan lain-lain 10 barang bukti. (<https://www.saibumi.com/artikel-94378-operasi-sikat-krakatau-2019-polda-lampung-ungkap-14-kasus-c3-9-tersangka-diringkus.html>, Diakses pada 5 November 2019 pukul 20.00 Wib).

Kemudian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kota Bandar Lampung didominasi dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor atau yang sering kita sebut Curat, Curas dan Curanmor (C3), tercatat selama tahun 2018 ini gangguan kamtibmas berupa kasus C3 masih paling menonjol. Kasus C3 yang dimaksud adalah Curat, Curas, dan Curanmor, dimana curat menjadi kasus yang paling banyak dengan 213 kasus lalu disusul dengan curanmor 195 kasus dan curas 72 kasus. (<https://lampung.tribunnews.com/2018/12/28/selama-2018-kasus-curat-masih-dominasi->

kejahatan-di-bandar-lampung, Diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wib).

Kelurahan Sukarame masuk zona merah paling rawan dari 140 kelurahan yang ada di Kota Tapis Berseri ini. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan kriminal yang tinggi di daerah Kelurahan Sukarame, selain daerahnya yang luas, padatnya penduduk disertai mobilitas yang tinggi dengan adanya banyak pendatang baru, ditambah jalan sepi dan banyaknya mahasiswa yang membawa kendaraan, situasi ini digunakan bagi pelaku kejahatan untuk beraksi (<https://www.saibumi.com/artikel-75836-masuk-zona-merah-tindak-kejahatan-kelurahan-sukarame-bandar-lampung-giatkan-patrol.html> di akses pada 1 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib).

Keamanan dan ketertiban di Kelurahan Sukarame dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah kasus perkelahian, pencurian dan perampokan, perjudian dan kasus narkoba. Dari berbagai kasus tersebut, kasus yang paling menonjol terjadi di Kelurahan Sukarame adalah kasus Pencurian. Berdasarkan data Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame tercatat kasus pencurian mengalami grafik yang naik dan turun setiap tahunnya mulai dari tahun 2016-2019.

Dalam mengatasi hal yang berkaitan dengan kemashalatan bersama yakni Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentunya tidak bisa kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian dalam mencegah dan mengurangi berbagai macam tindak kejahatan melainkan harus di lakukan oleh semua elemen disuatu lingkungan dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di suatu lingkungan masyarakat. Hal ini lah yang membuat lurah Sukarame melakukan sebuah terobosan dengan membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan di lingkup paling kecil yakni di Kelurahan Sukarame.

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah sebuah program yang dibuat oleh Lurah Sukarame bersama aparatur desa dan warga setempat untuk mengatasi masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) terutama mengurangi tindak kejahatan

kriminalitas di lingkungan Sukarame, dimana Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang beranggotakan aparaturnya kelurahan dan masyarakat setempat. Sistem Keamanan Terpadu merupakan penggunaan dari berbagai alat bantu yang dapat memantau, mencegah, mengontrol, dan melindungi warga dari tindakan kejahatan secara menyeluruh dan terkoordinasi guna mempersulit seorang melakukan kejahatan, berbagai jenis peralatan keamanan harus selalu dihadirkan. Berbagai alat, baik yang bernapas maupun yang tidak, bergerak maupun diam, harus ikut dilibatkan secara bersama-sama agar warga dapat selalu bebas beraktifitas tanpa dihantui rasa takut. Di Kelurahan Sukarame sendiri Komponen Keamanan Terpadu yaitu, sebagai petugas keamanan adalah gabungan dari Aparatur Kelurahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa kelurahan Sukarame yang melakukan control/patrol secara berkelanjutan untuk memperkecil ruang lingkup aksi kejahatan, tentunya para aparaturnya kelurahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa memiliki dana yang cukup serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Peralatan keamanan yaitu berupa HT yang dibagikan pada setiap anggota. Komunitas keamanan Terpadu (K2T) dalam proses perjalanannya yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun ini tercipta karena adanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun pihak *stakeholder* yang terlibat dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame tersebut seperti Aparatur kelurahan Sukarame, Bhabinkamtibmas, Babinsa kelurahan Sukarame, RAPI Kecamatan Sukarame serta dari masyarakat yang memberikan bantuan baik materi maupun non materi dapat terlaksana melalui praktek *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjelasan tidak dijabarkan terperinci jenis organisasi yang tergabung dalam praktik tersebut. Kerjasama antar organisasi hanya terlihat tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.

Collaborative Governance merupakan suatu cara yang di lakukan oleh Kelurahan Sukarame dalam menciptakan Keamanan dan

Ketertiban (Kamtibmas), mengingat Kelurahan Sukarame tidak bisa menjaga dan menciptakan kondisi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) dengan maksimal apabila hanya kelurahan saja yang bertindak. Tentu perlu adanya dukungan dan bantuan dari berbagai *stakeholders* yang memang memiliki tujuan yang sama dengan Kelurahan Sukarame. Komunitas Keamanan dan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame merupakan sebuah area berkolaborasi bagi siapa saja *stakeholders* yang memang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan (Sukarame).

Alasan peneliti dalam mengangkat tema tersebut sebagai obyek penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis *collaborative governance* melalui partisipasi yang di lakukan oleh berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

	Penelitian Pertama	Penelitian Ke-dua	Penelitian Ke-tiga
	I	II	III
Nama	Denny Irawan (2017)	Yanuar Agung Anggoro (2006)	Izzul Fatchu Reza (2014)
Judul	(<i>Collaborative Governance</i> (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik	Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat : Pengalaman COP Malioboro	(<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Buruh Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Tujuan	Untuk mendeskripsikan proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya.	Untuk mengetahui potret praksis kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan <i>Community Oriented Policing</i> (COD) atau pemolisian berbasis masyarakat	Untuk mendeskripsikan keberlangsungan <i>collaborative governance</i> belum memberikan hasil optimal antara aktor terkait dalam pengelolaan buruh migran di DIY dan mengetahui faktor penghambat <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan TKI di DIY
Fokus Penelitian	Fokus penelitian lebih kepada Indikator yang digunakan: <i>Identifying Obstacles and Opportunities</i> (Fase Mendengarkan), <i>Debating Strategies For Influence</i> (Fase Dialog), dan <i>Planning Collaborative Actions</i> (Fase Pilihan)	Penelitian berfokus pada kolaborasi antara pemerintah, polisi dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Malioboro.	Fokus penelitian : menilai dinamika kolaborasi, prosedur, kepemimpinan, pengaturan institusional, pengetahuan dan sumber daya. Serta melihat faktor-faktor penghambat <i>collaborative governance</i> pengelolaan TKI DIY
Hasil Penelitian	Proses kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya dilakukan melalui tahapan <i>Identifying Obstacles and Opportunities, Strategies for Influence dan Planning</i>	Pembuatan kebijakan pemolisian secara kolaboratif tidak hanya menyangkut upaya melibatkan masyarakat itu sendiri, tetapi juga merupakan upaya dalam perubahan pandangan terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dalam <i>collaborative governance</i> terhadap pengelolaan TKI yang ada di DIY masih belum adanya kejelasan

<i>Collaborative Actions</i> belumberjalan Kriteria <i>Distributive Accountability</i> dan <i>Access to Resources</i> tahap <i>Debating Strategies for Influence</i> belum terpenuhi menunjukkan kurangnya keterlibatan <i>stakeholders</i> , ketersediaan sumber keuangan masih belum mencukupi.	kepolisian. COP Malioboro masih dikatakan proyek uji coba, yang masih terus dikembangkan sebagai paradigma pemolisian berbasis masyarakat benar benar tertanam di tubuh kepolisian bukan hanya di Babinkatibmasnya saja. Karena masalah keamanan dan ketertiban menjadi hal yang sangat di perhatikan oleh setiap <i>stakeholder</i> yang terlibat kolaborasi dalam COP Malioboro.	terhadap prosedur dan faktor-faktor penghambat yang ada, seperti : tidak adanya inisiatif dan keterbukaan antara BP3TKI dan Disnakertrans, tidak adanya keterlibatan swasta dalam dan LSM, serta kurang memdainya dalam fasilitas teknologi
---	--	---

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2019

Berdasarkan perbandingan keempat penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Penelitian ini memiliki judul “Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative Governance* Melalui Partisipasi *Stakeholders* (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame)”. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah Mendapatkan deskripsi dan menganalisis bagaimana Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative Governance* Melalui Partisipasi *Stakeholders* (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame)

Adapun indikator yang gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi dan menganalisis bagaimana Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative Governance* Melalui Partisipasi *Stakeholders* (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame) menurut Alter dan Hage dalam Islamy (2018:3),) menjelaskan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel

dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendirian.

Collaborative Governance

Definisi *Collaborative Governance* menurut Alter dan Hage dalam Islamy (2018:3),) menjelaskan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendirian.

Kemudian menurut Cordery, Hartman et al., dalam Mah & Hills (2012:89), *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.

Menurut Junaidi (2018:8) menyebutkan bahwa *Collaborative governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga.

Bahwa *collaborative governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya *collaborative governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

Dari pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan model keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi berorientasi konsensus.

Menurut Imperial dalam Sabaruddin (2015:49) terdapat 6 dasar pemikiran menggunakan *collaborative governance* yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan kepentingan pribadi Individu dan organisasi berkolaborasi karena mereka dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain.
2. Mendapatkan sumber daya Organisasi yang ada dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas dan tergantung pada berbagai tingkatan dalam mencapai kepentingan organisasi.
3. Menjawab tekanan politik Kolaborasi adalah produk dari meningkatnya permintaan dari para politisi dan masyarakat untuk berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang sama.
4. Reaksi atas kekuatan institusional Peserta pelaksanaan proses kolaboratif sebagai cara efektif memecahkan masalah ekonomi, teknis dan strategis.

5. Mengurangi biaya transaksi Organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika mereka mengharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategi.
6. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi Meningkatkan fitur demokratis sistem pemerintah federal didasarkan modal sosial dan mendorong masyarakat sipil membangun jaringan organisasi dan sosial

Teori Imperial digunakan oleh peneliti sebagai fokus penelitian dikarenakan untuk melihat apakah kolaborasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berlandaskan ke enam indikator diatas atau bahkan tidak semua melalui *partisipasi* yang dilakukan oleh setiap *stakedolders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame.

Pendapat di atas menyatakan bahwa kolaborasi dilakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap muncul akibat beragamnya kepentingan antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.

Stakeholders

Menurut Freedman dalam Pratama (2017:12), *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Budimanta dkk dalam Pratama (2017:12) mengungkapkan bahwa, *stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program. Munawaroh dalam Pratama (2017:11-12) mengatakan bahwa *stakeholder* adalah orang yang secara

langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif ataupun negatif.

Selanjutnya *stakeholder* juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal *stakeholder* dan eksternal *stakeholder*. Eksternal *stakeholder* merupakan sekelompok individu yang bukan merupakan bagian dari anggota organisasi namun, mempengaruhi organisasi. Sedangkan internal *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang tidak secara tegas menjadi bagian dari lingkungan organisasi karena sebenarnya internal *stakeholder* adalah anggota dari organisasi, dimana para manajer memiliki tanggung jawab atas kepentingan mereka.

Partisipasi

Menurut Theodorson dan Raharjo dalam Mardikanto (2013:18) Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Sedangkan Verhagen dalam Mardikanto (2013:81), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Menurut Theresia (2015:196) pengertian partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosional. Bisa dijelaskan sebagai bentuk demokrasi dimana individu atau kelompok (masyarakat) ikut serta dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan serta juga memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya dalam mencapai tujuan.

Ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat baik itu dalam bentuk benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah

pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).

Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Menurut Holil Soelaiman dalam Kiki Apriandi (2012:15) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dalam masyarakat antaralain adalah:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan melalui uang.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda.
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
5. Partisipasi buah pikiran adalah merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
6. Partisipasi sosial adalah partisipasi diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban, misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau

tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

7. Partisipasi representatif adalah Partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Sukarame melalui partisipasi *stakeholders*. sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak luas dalam fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yang menjelaskan bahwa, teknik yang dipilih untuk menganalisa data adalah tekni analisa interaktif, yang dimulai dari teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus dalam peneletian ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis *collaborative governance* di Kelurahan Sukarame mealului partisipasi *stakeholders*. sewaktu peneliti melakukan observasi dengan mendatangi POS Keamanan Terpadu milik Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan

melakukan wawancara dengan para *stakeholders* yang terlibat. Ternyata Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame merupakan sebuah area berkolaborasi bagi siapa saja yang memang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Adapun berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dimana terdapat beberapa *stakeholders* yang ikut terlibat berpartisipasi di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) diantaranya, Kelurahan Sukarame, Babinkatibmas Sukarame, Babinsa Sukarame, RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat. Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* beranekaragam mulai dari partisipasi uang, harta benda, tenaga, keterampilan, bauh pikiran, sosial dan representatif.

Tabel 1. Peralatan Operasional Yang di Miliki Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

No	Alat Operasional K2T	Jumlah
1	Mobil Patroli Terpadu	2
2	POS Keamanan Terpadu	1
3	HT	100 (kurang lebih)

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2019)

Berdasarkan tabel di atas bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki beberapa alat operasional dalam memedahkan para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) untuk melakukan berbagai kegiatan seperti patroli keamanan terpadu, penyebaran informasi, penjagaan POS keamanan terpadu, dan lain sebagainya dengan tujuan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan dan lain sebagainya guna menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Terkait dengan POS Keamanan Terpadu dilakukan dengan biaya swadaya dari para anggota, namun akibat tidak bisa dipenuhinya biaya pembangunan POS tersebut H. Akmada selaku dari pihak swasta yang menambahkan biaya pembangunan POS Keamanan Terpadu yang dilakukan dalam dua kali tahapan

pembangunan. Kemudian terkait dengan Mobil Keamanan Terpadu difasilitasi oleh Bapak Rudihartono baik itu mobil pertama dan kedua dengan tujuan mempermudah patroli keamanan terpadu yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).



Gambar 1. Mobil Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

Sumber: *Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) (2019)*

Gambar di atas menunjukkan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki alat operasional kegiatan dalam hal patroli terpadu yang dilakukan oleh para anggota dan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) seperti pertemuan di Polsek Sukarame dan lain sebagainya. Kendaraan ini difasilitasi oleh Bapak Rudi Hartono sebagai pihak swasta dari pengusaha lokal di Kelurahan Sukarame dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) ini bisa dipermudah apabila komunitas ini memiliki alat operasional sendiri.



Gambar 2. POS Keamanan Terpadu

Sumber: *Dokumentasi dan Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) (2019)*.

Gambar di atas menjelaskan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame memiliki fasilitas sendiri berupa POS penjagaan yang digunakan oleh anggota untuk berjaga di malam hari. Pembangunan POS ini telah melalui dua tahapan, yakni pembangunan pertama dan kedua. Dimana pembangunan ini menggunakan dana swadaya dari para

anggota namun ketidakcukupan dana akhirnya dibantu oleh Bapak H. Akhmada dari swasta pengusaha lokal di Kelurahan Sukarame terkait membantu finansial dalam pembangunan POS Keamanan Terpadu.



Gambar 3. HT Yang Digunakan Anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

Sumber: Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) (2019)

Gambar di atas menjelaskan bahwa salah satu alat operasional untuk anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) untuk mempermudah penyebaran informasi diantara para anggota terkait dengan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah Kelurahan Sukarame. Terkait penyediaan alat ini, para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) menggunakan uang pribadi masing-masing setiap anggota. Terkait dengan pesawat HT tersebut atau repiter pihak RAPI Kec. Sukarame yang membantu dalam segi hal bantuan pembinaan dan teknis.

Selain berbagai partisipasi yanberbentuk uang dan harta benda. Komunitas Keamanan Terpadu juga memiliki berbagai kegiatan yang tentunya sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait dalam bentuk tenaga.



Gambar 4. Piket Rutin Anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

Sumber: Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) (2019)

Gambar diatas menjelaskan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki salah satu kegiatan yakni piket rutin yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan masyarakat yang rutin dilakukan setiap malam dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 24.00/03.00 Wib.



Gambar 5. Patroli Terpadu

Sumber: Dokumentasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) (2019)

Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni patroli terpadu yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu dan masyarakat dengan berkeliling ke daerah-daerah yang rawan tindak kejahatan di Kelurahan Sukarame.



Gambar 6. Giat Terpadu

Sumber: Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)(2019)

Gambar di atas merupakan salah satu kegiatan yang dimiliki oleh Komunitas

Keamanan Terpadu (K2T) yakni giat terpadu. Kegiatan ini merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh jajaran anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terkait dengan banyaknya keluhan-keluhan yang diajukan oleh masyarakat kepada lurah, Babinkatbimas, Babinsa, Kepala Lingkungan yang mengganggu Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

Menelusuri Terwujudnya *Collaborative Governance* dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

Melaksanakan Kepentingan Pribadi

Menurut Imperila dalam Sabaruddin (2015:49) terdapat 6 indikator yang menjadi dasar pemikiran dalam menggunakan *collaborative governance*, dinataranya :

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan sebuah program dari kelurahan Sukarame yang melibatkan berbagai macam *stakeholders* untuk mengatasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang mulai terganggu dengan sering terjadinya berbagai tindak kejahatan yang mengganggu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kolaborasi merupakan cara yang dipilih oleh kelurahan Sukarame dalam mengatasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas), mengingat berkolaborasi merupakan suatu cara yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu *stakeholder* saja melainkan harus melibatkan partisipasi dari berbagai macam *stakeholders*.

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang ada di kelurahan Sukarame awal mula terbentuknya sampai pelaksanaannya hingga saat ini melibatkan berbagai *stakeholders*. Pada awal mula pembentukan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berawal dari inisiasi kelurahan yang kemudian didukung oleh pihak Babinkatbimas dan Babinsa Kelurahan Sukarame. Kemudian setelah terbentuk dan berjalannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terdapat beberapa *stakeholders* lain yang mulai ikut bergabung dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni dari pihak RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukarame. Partisipasi yang dilakukan oleh semua *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) semuanya berdasarkan kepentingan bersama,

yakni bagaimana masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan Sukarame yang mulai terganggu akibat sering terjadinya tindak pelaku kejahatan yang mengganggu aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah.

Mereka melakukan kolaborasi dikarenakan ada suatu hal yang tidak bisa mereka selesaikan dengan maksimal ketika mereka bergerak sendiri-sendiri. Oleh karena itu kolaborasi adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kehidupan orang banyak yakni permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang mulai terganggu oleh terjadinya banyak tindakan pelaku kejahatan. Masing-masing *stakeholders* yang ikut serta bergabung di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) mempunyai kepentingan yang sama yakni ikut terlibat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai wujud keikutsertaan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

Mendapatkan Sumber Daya

Kelurahan, Babinkatbimas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat adalah sumber daya dalam menggerakkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame. Inisiatif dari kelurahan membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan salah satu cara bagaimana bisa menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) dengan melibatkan berbagai macam *stakeholders*. Tidak maksimalnya kelurahan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentunya sangatlah dimklumi, mengingat sumber daya yang terbatas dari pihak kelurahan baik itu dari segi manusianya maupun keuangannya. Pelibatan berbagai macam *stakeholders* dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) mulai dari Babinkatbimas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat melalui Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah suatu cara yang tepat.

Melibatkan partisipasi dari berbagai *stakeholders* merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Karena kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing

stakeholders yang terlibat dapat menutupi kekurangan yang ada dengan kelebihan-kelebihan yang di miliki oleh masing-masing *stakeholders* satu sama lain. Karena Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam perjalanannya tentu sangat membutuhkan yang namanya sumber daya baik itu manusia maupun non manusia (materi).

Kolaborasi yang dilakukan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan partisipasi dari berbagai *stakeholders* mulai dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang merupakan sebuah komunitas sosial yang tentunya sangat membutuhkan berbagai sumber daya baik manusia maupun non manusia (materi) dalam mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya lebih baik lagi.

Menjawab Tekanan Politik

Pada tahun 2016 kelurahan Sukarame merupakan salah satu kelurahan yang masuk ke dalam zona merah dari 140 kelurahan yang ada di kota Bandar Lampung yang rawan tindak pelaku kejahatan mulai dari kasus pencurian, penjambeitan, pembegalan dan lain sebagainya yang membuat Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan sukarame menjadi terganggu.

Selain berbagai aduan dari kalangan masyarakat kelurahan Sukarame, Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk jawaban yang diberikan kelurahan, Babinkatibmas, dan Babinsa kelurahan Sukarame dengan cara yang berbeda terkait dengan himbauan dari wali kota dan Kapolres Kota Bandar Lampung melalui surat edaran dari masing-masing pihak. Adapun surat edaran wali kota Bandar Lampung nomor 300/1329/III.19/2016 tentang peningkatan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat dan surat edaran Kapolres Bandar Lampung nomor SE/47/412/11/2016 tentang membentuk dan mengaktifkan kembali pos kamling.

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk jawaban dari banyaknya berbagai tekanan dari pihak-pihak lain dengan

melibatkan partisipasi dari berbagai *stakeholders* mulai dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat yang saling bekerjasama satu sama lain dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan Sukarame.

Kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan partisipasi dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat merupakan bentuk jawaban dari kelurahan Sukarame dalam mengatasi aduan-aduan dari masyarakat kelurahan Sukarame yang mulai resah dan geram atas maraknya pelaku tindak kejahatan yang mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah lingkungan kelurahan Sukarame. Kemudian selain aduan-aduan dari masyarakat juga terdapat instruksi para politisi pemangku kepentingan yang lain seperti dari wali kota dan Kapolres Bandar Lampung.

Reaksi Kekuatan Institusional

Setelah beberapa waktu berjalannya program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame mulai mendapat simpatik dari beberapa *stakeholders* yang ingin juga bergabung dan ikut berpartisipasi mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Beberapa *stakeholders* yang bergabung diantaranya adalah RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat. Mereka melihat Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame merupakan sebuah cara yang cukup bagus sebagai wadah bagi para *stakeholders* yang lainnya untuk bergabung dan bekerja secara bersama-sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dalam memberikan bantuan-bantuan baik dari segi tenaga, pemikiran, strategi, teknis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Kolaborasi yang terjadi didalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan berbagai macam *stakeholders* tentunya sangat efektif dalam memecahkan masalah ekonomi, teknis, dan strategis. Setelah bergabungnya RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat tentu sangat membantu dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Seperti halnya ketika RAPI. Kec. Sukarame berkunjung

dan melihat bagaimana dan apa itu Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang ada di kelurahan Sukarame melalui ketua RAPI Kec. Sukarame yang memang berdomisili di kelurahan Sukarame melihat program ini sangatlah bagus namun dalam hal mencegah terjadinya tindakan pelaku kejahatan. Namun masih perlu dikembangkan hal-hal lain yang sekiranya dapat mempermudah para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam mencegah tindakan pelaku kejahatan dengan melengkapi para anggota dengan peralatan yang bisa memudahkan mobilisasi penyebaran informasi diantara semua anggota. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh RAPI Kec. Sukarame masuk kedalam dua bentuk yakni partisipasi dalam bentuk nyata (berwujud) dan tidak nyata (tidak berwujud).

Pemberian masukan pemikiran tersebut berupa penggunaan HT yang harus digunakan oleh setiap anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk partisipasi yang tidak nyata (tidak berwujud) karena memberikan masukan strategi. Karena RAPI Kec. Sukarame melihat bahwasannya HT sendiri dapat digunakan oleh setiap anggota sebagai alat komunikasi antar anggota satu dengan yang lain terkait dengan informasi pelaku tindakan kejahatan yang terjadi di kelurahan Sukarame. Sehingga para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dapat bergerak dengan cepat dalam melakukan pencegahan dan penangkapan yang bisa dilakukan secara cepat oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

Setelah masukan pemikiran dari RAPI Kec. Sukarame diterima oleh *stakeholders* Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), RAPI Kec. Sukarame membantu dalam hal tenaga teknis pembuatan refiter sebagai pesawat untuk penggunaan HT oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu. Karena RAPI Kec. Sukarame memiliki kapasitas dalam hal tersebut.

Selain dari pihak RAPI Kec. Sukarame, pihak swasta yang merupakan para pengusaha yakni Bapak H. Akmada dan Bapak Rudihartono yang membantu dalam mengatasi masalah pendanaan ekonomi. Bapak Hj. Akhmada dan Bapak Rudihartono merupakan representasi dari pihak swasta yang membantu dalam hal fasilitasi pendanaan dalam penyediaan fasilitas-

fasilitas penunjang. POS Keamanan Terpadu merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Komunitas Keamanan Terpadu sebagai titik kumpul para anggota ketika melakukan ronda rutin dan kumpul-kumpul mengadakan suatu kegiatan. Penyediaan fasilitas POS Keamanan Terpadu merupakan salah satu bantuan pendanaan dari Bapak Hj. Akmada dalam pembangunannya. Kemudian mobil patroli terpadu yang digunakan oleh para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam memudahkan mobilitas peregerakkan dalam kegiatan patroli terpadu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

Keterlibatan dari berbagai *stakeholders* mulai dari lurah, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) menciptakan sebuah bentuk tingkatan partisipasi. Partisipasi yang terciptas di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan tingkat partisipasi kekuatan masyarakat. Mengingat Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame diciptakan untuk kepentingan bersama yakni menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas). Partisipasi kekuatan masyarakat yang terjadi di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah terciptanya kemitraan diantara satu sama lain *stakeholders* yang saling melengkapi. Pada tahap partisipasi ini, setiap *stakeholders* yang ikut terlibat dapat memberikan aspirasi masukan pemikiran-pemikiran strategi baik itu teknis, ekonomi, startegis dan lain sebagainya yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh salah satu *stakeholder* saja.

Mengurangi Biaya Transaksi

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) melakukan kolaborasi yang melibatkan berbagai *stakeholders* dalam pengembangannya tentu tidak menginginkan adanya pelalaian tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan kapasitas. Tujuan dari kolaborasi muncul lantaran adanya hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh masing-masing *stakeholders* dalam mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Partisipasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) karena menawarkan beberapa janji yang bisa mengurangi biaya diantara satu sama lain. Seperti halnya kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat ketika mereka melakukan kolaborasi tentunya akan menutupi kekurangan diantara satu sama lain dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*. Kemampuan kelurahan, Babinkatibmas dan Babinsa dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang tidak bisa begitu maksimal tentu perlu adanya bantuan dari *stakeholders* yang lain baik itu dari RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menciptakan sinergisitas diantara satu sama lain dengan memberikan kepercayaan penuh kepada setiap masing-masing *stakeholders* yang terlibat.

Sifat terbuka Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam menerima berbagai *stakeholders* yang memang mau ikut terlibat dalam partisipasi membuat terciptanya suasana tawar-menawar dalam hal masukan-masukan pemikiran dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Seperti halnya yang ditawarkan dari pihak RAPI Kec. Sukarame dan swasta yakni Bapak Hj. Akmada dan Bapak Rudihartono dalam hal pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dimana RAPI menawarkan masukan pemikiran dalam penggunaan HT sebagai alat perelngakapan bagi setiap anggota dalam hal kemudahan akses informasi terkait dengan tindakan pencegahan dan penangkapan tindak pelaku kejahatan. Kemudian dari pihak Bapak Hj. Akmada dan Bapak Rudihartono dalam menawarkan pemberian bantuan pendanaan baik yang bersifat materi maupun non materi seperti pembangunan POS Keamanan Terpadu dan Mobil Patroli Terpadu sebagai bentuk bantuan dalam penyediaan fasilitas penunjang dalam memudahkan mobilisasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam bergerak.

Kolaborasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh setiap kelurahan Sukarame dengan melibatkan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* terkait yang

tergabung dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) bahwasannya kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi, baik itu biaya yang berupa finansial maupun non finansial dalam memberikan manfaat pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Sukarame dalam segi hal Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas).

Mempromosikan Nilai-Nilai Demokrasi

Kelurahan, Babinkatibmas dan Babinsa sama-sama mempunyai tanggung jawab menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah yang dia kuasai. Begitupula Kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa Sukarame mempunyai tanggung jawab dalam menjaga wilayah Kelurahan Sukarame dari berbagai tindakan pelaku kejahatan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Dalam melakukan tugas tersebut tentunya masing-masing pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan perlu adanya bantuan dari pihak-pihak lain. Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan sebuah wadah untuk berbagai *stakeholders* yang mau ikut berpartisipasi dengan terlibat dalam pengembangan komunitas ini agar bisa sebagai bentuk terobosan dalam mencegah terjadinya tindak pelaku kejahatan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

Kolaborasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki satu tujuan yang sama yakni bagaimana bisa menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang aman sehingga masyarakat bisa beraktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut dan waswas ketika beraktivitas di luar rumah maupun dirumah. Dalam menciptakan hal tersebut tentu perlu adanya keterlibatan dari para *stakeholders* baik itu kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat dengan memberikan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik itu pemikiran, strategi, teknis,

ekonomi dan lain sebagainya dengan semaksimal mungkin.

Demokrasi merupakan salah satu landasan dalam menjalankan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Mengingat adanya berbagai *stakeholders* yang memiliki kemampuan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu penerapan nilai-nilai demokrasi dalam komunitas ini sangat dikedepankan. Terbukti dengan diterimanya masukan-masukan yang diberikan dari pihak-pihak *stakeholders* dan diberikan *stakeholders* tersebut diberikan kewenangan yang cukup besar dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) baik itu sebagai pembina, ketua, wakil ketua, koordinator dan lain sebagainya. Seperti halnya kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI Kec. Sukarame diberikan wewenang dalam hal pembinaan terkait dengan pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian dari pihak masyarakat tidak dibiarkan begitu saja, masyarakat dilibatkan sebagai roda penggerak Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) mulai dari ketua, wakil ketua, dan kepala dan wakil kepala koordinator hal ini mengingat bahwasannya peran yang diberikan tersebut akan berdampak juga pada Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang dirasakan oleh masyarakat juga.

V. PENUTUP

Simpulan

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dibentuk oleh Kelurahan Sukarame sebagai area berkolaborasi bagi siapa saja *stakeholders* yang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Partisipasi yang dilakukan oleh berbagai *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terdiri dari berbagai bentuk mulai dari partisipasi yang nyata misalnya seperti uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan serta partisipasi yang tidak nyata seperti buah pikiran dan sosial.

Dari berbagai bentuk partisipasi tersebut mewujudkan yang namanya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis

collaborative governance. Hal ini terlihat sebagai berikut :

- a. Adanya suatu kepentingan bersama yang tidak bisa dilakukan oleh salah satu *stakeholder* saja, melainkan harus melibatkan berbagai macam *stakeholders* yakni menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame dari berbagai tindakan pelaku kejahatan.
- b. Adanya sumber daya yang tercipta dari kolaborasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) mulai dari sumber daya manusia dan non manusia.
- c. Komunitas Keamanan Terpadu terbentuk karena adanya tekanan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat Kelurahan Sukarame yang mulai resah dengan sering terjadinya berbagai tindakan pelaku kejahatan.
- d. Kolaborasi yang dilakukan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi biaya-biaya transaksi dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*.
- e. Dari kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholders* terciptanya nilai-nilai demokrasi di dalam struktur kepengurusan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

Saran

Berdasarkan simpulan di atas aryan yang dapat penulis berikan adalah upayakan bagaimana Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) bisa dipertahankan di masa kepemimpinan lurah yang baru. Karena belum tentu program ini bisa berlanjut di kemudian hari di karenakan berbeda masa kepemimpinan. Mengingat masa waktu jabatan lurah yang tidak menentu bisa 1 tahun, 2, tahun, 3 tahun bahkan sampai 5 tahun lebih sesuai dengan keputusan bupati atau walikota yang menunjukkannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Duajdi, N., Tresiana, N., Faedlulloh, D. (2019). Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Islamy, S. 2018. COLLABORATIVE GOVERNANCE Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Depublish
- Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sabaruddin, A., 2015. Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 1 penyunt. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Aprillia dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung:PenerbitAlfabeta

Jurnal dan Skripsi

- Apriandi, Kiki. 2012. Pengaruh Pandangan Materealistis Dan Sikap Individualis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong Di Kelurahan Wayhalim Permai Rt 08 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun . Universitas.Lampung.
- Agung, Yanuar Anggoro. 2006. Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat : Pengalaman COP Malioboro. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, hlm. 115-131.
- Faedlulloh, D., & Prasetyanti, R. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, 12(2), 43-60.
- Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Irawan, B. (2019). Kampung versus Climate Change: The Dynamics of Community Empowerment through the Climate Village Program (ProKlim). In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1424, No. 1, p. 012055). IOP Publishing.

- Irawan, D., 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(ISSN 2303-34IX), hlm. 1-12.
- Junaidi. 2016. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 1-35
- Mah, D. N.-y. & Hills, P., 2012. Collaborative Governance for Sustainable Development : Wind Resource Assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China. *Sustainable Development Sust. Dev.* 20, Issue 10.1002/sd.466, hlm. 85-97.
- Reza, I. F., 2014. Collaborative Governance dalam Pengembangan Buruh Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, hlm. 158-166.

Sumber Online :

- <https://lampung.tribunnews.com/2018/12/28/selama-2018-kasus-curat-masih-dominasi-kejahatan-di-bandar-lampung>, Diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wib
- <https://www.saibumi.com/artikel-75836-masuk-zona-merah-tindak-kejahatan-kelurahan-sukarame-bandar-lampung-giatkan-patroli.html> di akses pada 1 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib
- <https://www.saibumi.com/artikel-94378-operasi-sikat-krakatau-2019-polda-lampung-ungkap-14-kasus-c3-9-tersangka-diringkus.html> Diakses pada 5 November 2019 pukul 20.00 Wib